



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 38 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH  
UNTUK PERKUATAN MODAL USAHA BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan usaha serta peningkatan pendapatan bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1625;
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008 tentang Badan - badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Penghasilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK 03/2008 tentang Badan - badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Penghasilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);

29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH UNTUK PERKUATAN MODAL USAHA BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

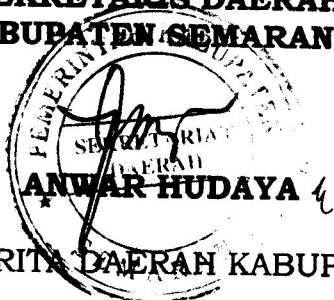
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01-05-2013



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01-05-2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 38

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 38 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
BANTUAN HIBAH UNTUK  
PERKUATAN MODAL USAHA  
BAGI KELOMPOK USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL  
DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

---

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH  
UNTUK PERKUATAN MODAL USAHA BAGI KELOMPOK USAHA MIKRO  
DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Peningkatan Usaha dan Peningkatan Pendapatan dalam menumbuh kembangkan kebersamaan melalui Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang.

Bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Petunjuk Teknis pemberian bantuan hibah perkuatan modal usaha ini adalah sebagai berikut :

1. sebagai pedoman dalam penggunaan belanja hibah untuk perkuatan modal usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha kecil di Kabupaten Semarang ;
2. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
2. agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.

3. meningkatkan aktivitas usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;
4. untuk meningkatkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
5. untuk menambah modal usaha, pembelian peralatan produksi maupun untuk pembelian bahan baku produksi bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil guna pengembangan usaha.

## II. SASARAN

Sasaran dari pemberian hibah ini adalah Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN HIBAH

Hibah diberikan dalam bentuk uang yang besarnya dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

### A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang .

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan perkuatan modal usaha diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah bantuan diberikan pada masing - masing kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil penerima bantuan dan dapat direalisasikan oleh kelompok sesuai dengan kebutuhan dari kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja ( RAB )

### C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah untuk Perkuatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang dapat dipergunakan untuk penambahan modal usaha, pembelian peralatan produksi atau bahan produksi guna pengembangan usaha tanpa ada kewajiban pengembalian bantuan dari penerima bantuan.

## IV. KRITERIA PENERIMA HIBAH

Penerima hibah adalah :

Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berdomisili di wilayah Kabupaten Semarang yang mempunyai usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan lain-lain.

## V. TATA CARA PENGAJUAN HIBAH

Tata cara pengajuan permohonan bantuan Perkuatan Modal Usaha secara hibah bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat mengajukan proposal secara tertulis ditujukan kepada Bupati Semarang yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan/ atau Camat dengan dilampiri syarat – syarat sebagai berikut :

1. Daftar Anggota Kelompok;
2. Susunan Pengurus diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat;
3. Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat bahwa kelompok / anggota kelompok yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha;
4. Jumlah anggota kelompok minimal 10 ( sepuluh ) orang dan berdomisili dalam satu desa .
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus dan anggota;
6. Foto copy Kartu Keluarga Pengurus dan Anggota ;
7. Membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB );
8. Membuat Pakta Integritas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); dan
9. Foto Kegiatan yang berkaitan dengan usaha.

## VI. TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Hibah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Tim Teknis Bantuan Hibah Perkuatan Modal Usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi :
  1. Penelitian terhadap kelengkapan persyaratan Administrasi;
  2. Identifikasi / Verifikasi ke lokasi usaha atas nama pemohon terhadap permohonan bantuan hibah tersebut; dan
  3. Mengusulkan kepada Bupati Semarang, Kelompok yang layak dan sesuai dengan kriteria.
- B. Keputusan atas pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang tentang penerima bantuan hibah kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- C. Berdasarkan hasil seleksi dan pengkajian tersebut yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
- D. Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening penerima bantuan hibah melalui Bank Jateng Cabang Ungaran;
- E. Ketua dan salah satu pengurus Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan Perkuatan Modal Usaha yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

F. Hibah berupa uang akan ditransfer ke rekening atas nama Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersangkutan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, atas usul Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang besarnya bantuan hibah di tetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### VII. MEKANISME PERTANGGUNG JAWABAN

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah bantuan hibah tersebut diterima dan kegiatan selesai dilaksanakan, maka penerima bantuan hibah mengirimkan Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) kepada Bupati Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

- A. Bukti penggunaan uang bantuan;
- B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

#### VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

##### A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

##### B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IX. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah untuk Perkuatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil , Menengah , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.

